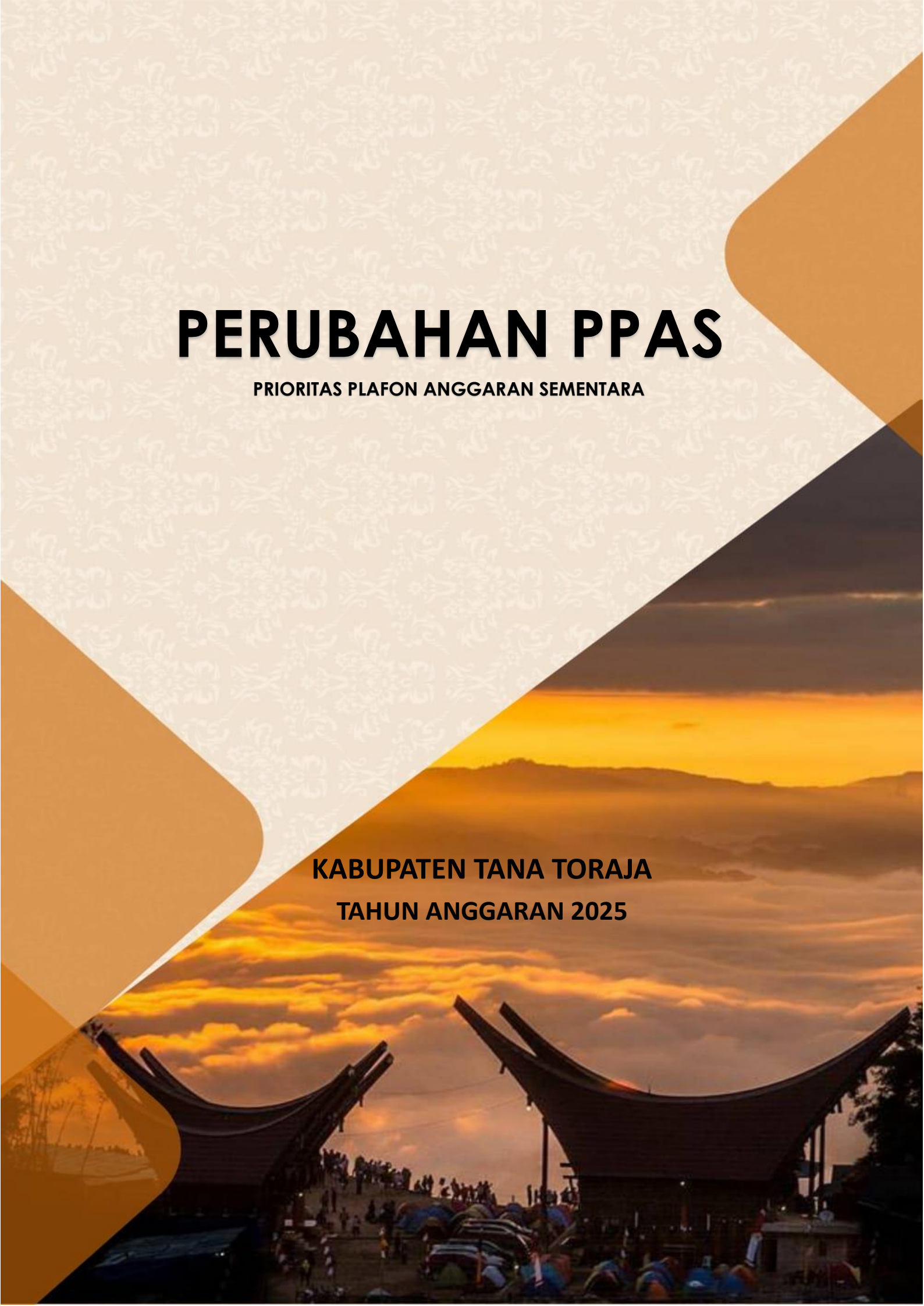


PERUBAHAN PPAS

PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

KABUPATEN TANA TORAJA

TAHUN ANGGARAN 2025



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

**NOMOR : 900.1.1/384/SETDA/VIII/2025
06/DPRD/VIII/2025**

TANGGAL, 29 AGUSTUS 2025

TENTANG PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **dr. ZADRAK TOMBEG, Sp.A**
Jabatan : Bupati Tana Toraja
Alamat Kantor : Jl. Pongtiku Nomor 120 Pantan Makale

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tana Toraja

2. a. Nama : **DRS. KENDEK RANTE**
Jabatan : Ketua DPRD
Alamat Kantor : Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 2 A Makale
- b. Nama : **LEONARDUS TALLUPADANG, SE**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD
Alamat Kantor : Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 2 A Makale
- c. Nama : **EVIVANA ROMBE DATU, S.Pd MM**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD
Alamat Kantor : Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 2 A Makale

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tana Toraja.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2025. Perlu disusun **Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS)** yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2025

Berdasarkan hal tersebut di atas dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025, para pihak sepakat terhadap **Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan** yang meliputi Rencana Pendapatan dan Penerimaan, Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2025

Secara lengkap **Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2025** disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan nota kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2025.

Makale, 29 Agustus 2025

BUPATI TANA TORAJA

Selaku

PIHAK PERTAMA



dr. ZADRAK TOMBEG, Sp.A

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TANA TORAJA

Selaku

PIHAK KEDUA



DRS. KENDEK RANTE

KETUA

LEONARDUS TALLUPADANG, SE

WAKIL KETUA

EVIVANA ROMBE DATU, S.Pd MM

WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan PPAS.....	3
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan PPAS	3
BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH	9
BAB III PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH.....	11
BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	56
4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	56
4.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga	59
BAB V RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH	61
BAB VI PENUTUP	62
Lampiran I. Rekapitulasi Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Setiap OPD	63

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Target Perubahan Pendapatan dan Penerimaan APBD Kab.Tana Toraja TA 2025.....	9
Tabel 3. 1 Visi, Misi Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Tana Toraja	14
Tabel 3. 2 Sinergitas dan Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Tana Toraja dengan Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan dan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025	16
Tabel 3. 3 Keselarasan Sasaran Pembangunan Daerah terhadap Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025.....	18
Tabel 3. 4 Sandingan Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2025 dan Perubahan RKPD Tahun 2025	25
Label 4.1 Rekapitulasi Perubahan Plafon Anggaran Sementara pada masing-masing SKPD Tahun Anggaran 2025.....	56
Tabel 5. 1 Perubahan Plafon Anggaran Pembiayaan Daerah	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disusun mengacu pada Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang secara bersama dijadikan bahan pembahasan antara Eksekutif dan Legislatif untuk disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati tersebut selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) pada masing-masing Perangkat Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 161 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dilakukan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut.

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA) dapat berupa terjadinya.
 - a. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
 - b. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah dan/atau;
 - c. Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat; dan/atau
5. Keadaan luar biasa

Sebagai proses awal dalam penyusunan dokumen perubahan APBD, penyusunan dokumen perubahan PPAS merupakan tahapan penting karena secara substansi, dokumen perubahan PPAS tahun anggaran 2025 memuat program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) memuat komponen-komponen prioritas dan plafon untuk pencapaian kinerja yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dimana komponen prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik disusun berdasarkan klasifikasi fungsi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Format penyusunan PPAS disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang memuat Rencana Penerimaan Daerah, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan serta Rencana Pembiayaan Daerah.

Implementasi ketentuan dalam melakukan Perubahan APBD sesuai dengan Pasal 162 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA kedalam rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 berdasarkan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dengan tetap mengacu pada pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025. Berkenaan kondisi tersebut di atas dan mengacu pada ketentuan perundang-undangan, maka Pemerintah Kabupaten Tana Toraja menyusun Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 yang kemudian disampaikan kepada DPRD untuk selanjutnya dibahas Bersama.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan PPAS

1. Menetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta anggaran yang ditambah/baru maupun yang dikurangi untuk diakomodir dalam rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
2. Menjaga konsistensi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan daerah meskipun terdapat perubahan anggaran.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
4. Menyinkronkan arah kebijakan umum anggaran pembangunan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi selama tahun anggaran berjalan.
5. Menyesuaikan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan perubahan-perubahan yang terjadi selama semester pertama tahun 2025.
6. Mengefektifkan pelaksanaan rencana pembangunan dan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan PPAS

Dasar hukum Penyusunan Perubahan PPAS Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 13. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72

- Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
 23. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
 24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);

25. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
27. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun

- 2015 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010-2030;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 04);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021 Nomor 02);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 31);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
39. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025.

BAB II

RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan daerah. Pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa Pendapatan Daerah meliputi. Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana digambarkan pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1 Target Perubahan Pendapatan dan Penerimaan APBD Kab.Tana Toraja TA 2025

Kode Rek.	Uraian	APBD Induk 2025	Perubahan APBD 2025	Bertambah/ (Berkurang)	
				Jumlah (Rp)	%
4.	PENDAPATAN DAERAH	1.239.133.346.000,00	1.177.245.703.753,00	(61.887.642.247,00)	-4,99%
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	165.340.947.608,00	168.192.781.578,00	2.851.833.970,00	1,72%
4.1.01.	Pajak daerah	56.007.738.608,00	55.007.738.608,00	(1.000.000.000,00)	-1,79%
4.1.02.	Retribusi daerah	89.032.552.000,00	90.253.478.110,00	1.220.926.110,00	1,37%
4.1.03.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	7.300.000.000,00	7.913.039.862,00	613.039.862,00	8,40%

4.1.04.	Lain-lain PAD yang sah	13.000.657.000,00	15.018.524.998,00	2.017.867.998,00	15,52%
4.2.	Pendapatan Transfer	1.054.571.830.392	990.250.914.540	(64.320.915.852,00)	-6,10%
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	984.168.551.000,00	919.847.635.148,00	(64.320.915.852,00)	-6,54%
4.2.01.01	Dana Perimbangan	984.168.551.000,00	919.847.635.148,00	(64.320.915.852,00)	-6,54%
	a. Dana Tranfer Umum	652.555.254.000,00	614.573.429.000,00	(37.981.825.000,00)	-5,82%
4.2.01.01.01	DBH	13.009.051.000,00	13.009.051.000,00	-	0,00%
4.2.01.01.02	DAU	639.546.203.000,00	601.564.378.000,00	(37.981.825.000,00)	-5,94%
	b. Dana Tranfer Khusus	232.766.058.000,00	206.426.967.148,00	(26.339.090.852,00)	-11,3%
4.2.01.01.03	- DAK Fisik	48.458.539.000,00	35.131.785.000,00	(13.326.754.000,00)	-27,5%
4.2.01.01.04	- DAK Non Fisik	184.307.519.000,00	171.295.182.148,00	(13.012.336.852,00)	-7,06%
4.2.01.05	Dana Desa	98.847.239.000,00	98.847.239.000,00	-	0,00%
4.2.02.	Transfer Antar Daerah	70.403.279.392,00	70.403.279.392,00	-	0,00%
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	49.863.261.392,00	49.863.261.392,00	-	0,00%
4.2.02.02	Pendapatan Bantuan Keuangan dari Provinsi	20.540.018.000,00	20.540.018.000,00	-	-
4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	19.220.568.000,00	18.802.007.635,00	(418.560.365,00)	-2,18%
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	19.220.568.000,00	18.802.007.635,00	(418.560.365,00)	-2,18%
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		1.239.133.346.000,00	1.177.245.703.753,00	(61.887.642.247,00)	-4,99%

BAB III

PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan perubahan kondisi dan permasalahan yang terjadi sampai dengan semester pertama tahun 2025 serta mengantisipasi perkembangan yang akan terjadi sampai dengan akhir tahun anggaran. Belanja daerah disusun berdasarkan prioritas dalam Perubahan RKPD, dengan memperhatikan prioritas provinsi maupun nasional. Oleh karena itu perubahan belanja daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan diprioritaskan program kegiatan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang terdiri dari, urusan wajib dan urusan pilihan serta unsur pendukung dan unsur penunjang urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam rangka mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah Tahun 2025 dan menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka kebijakan Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Operasi yang diarahkan kepada Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Kebijakan belanja daerah ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, secara selektif, akuntabel dan transparan serta mempertimbangkan program kegiatan yang bersifat mandatory.

Prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta prioritas pembangunan daerah Sulawesi Selatan dan Tana Toraja Tahun 2025 yang dirumuskan dalam rangka untuk mencapai target sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2029. Dokumen ini juga memuat kebijakan turunan dari prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.

Prioritas pembangunan disusun memperhatikan hasil evaluasi kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, capaian target pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2029, proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah serta kondisi lingkungan strategis internal dan eksternal. Substansi perubahan dan prioritas pembangunan daerah dalam Perubahan RKPD 2025 mendasarkan dan memperhatikan pada .

1. Arah kebijakan Pemerintah yang dijabarkan pada Rancangan RKP 2025.
2. Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2025-2030
3. Arah kebijakan RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2029 guna mencapai sasaran pembangunan Kabupaten Tana Toraja tahun 2025.
4. Konsistensi antara kebijakan Nasional dan Provinsi sebagai upaya pencapaian target pembangunan nasional maupun provinsi.
5. Penyelesaian terhadap masalah yang bersifat urgen pada tahun 2025.

Belanja daerah pada Perubahan APBD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis *money follow program priority*, memperhatikan prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan tahun 2025, serta dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Belanja daerah pada Perubahan APBD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 antara lain diarahkan untuk pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar, urusan pilihan sesuai dengan potensi daerah dan membiayai kegiatan-kegiatan strategis yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 serta pembayaran utang dari tahun-tahun sebelumnya.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai. Strategi dirumuskan dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam mencapai sasaran. Adapun rumusan strategi untuk Perubahan RKPD tahun 2024 mengalami perubahan dibanding RKPD Pokok Tahun 2025 yakni sebagai berikut .

1. Mengembangkan infrastruktur teknologi informasi berbasis kebutuhan publik;
2. Meningkatkan literasi digital di kalangan aparatur pemerintah;
3. Peningkatan fasilitas kesehatan hingga wilayah terpencil;
4. Mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam kurikulum pendidikan formal;
5. Mengadakan event budaya tahunan di tingkat daerah;
6. Memperkuat pendidikan berbasis kearifan lokal melalui kurikulum sekolah;
7. Memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas antar wilayah;
8. Meningkatkan fasilitas Pendidikan dan Kesehatan di wilayah pedesaan;
9. Memperluas kawasan pertanian produktif dengan teknologi modern;
10. Memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok melalui kebijakan logistik;
11. Meningkatkan produktivitas hasil pertanian dengan penerapan teknologi modern;
12. Mengembangkan potensi wisata lokal dengan melibatkan masyarakat;
13. Mendorong penerapan teknologi ramah lingkungan di sektor industri dan transportasi;
14. Optimalisasi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai dengan peraturan daerah.

Tabel 3. 1 Visi, Misi Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Tana Toraja

Visi . "Tana Toraja Maju dan Berdaya Saing Berdasarkan Nilai Budaya"		
Misi 1 . Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan yang tangkas dan dinamis melalui transformasi digital		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Mewujudkan pelayanan pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan	Peningkatan implementasi sistem digital dalam pelayanan publik	Mengembangkan infrastruktur teknologi informasi berbasis kebutuhan publik
	Meningkatkan literasi digital aparatur pemerintah	Meningkatkan literasi digital di kalangan aparatur pemerintah
Misi 2 . Memperkuat Pembangunan SDM yang Sehat, Cerdas, Produktif, dan Berbudaya		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penguatan sektor pendidikan dan kesehatan	Peningkatan akses layanan kesehatan yang merata	Peningkatan fasilitas kesehatan hingga wilayah terpencil
	Pengembangan program pendidikan berbasis teknologi	Mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam kurikulum pendidikan formal
Meningkatkan pelestarian dan penguatan nilai-nilai budaya lokal untuk membentuk masyarakat yang berkarakter	Meningkatkan pelestarian dan promosi budaya lokal	Mengadakan event budaya tahunan di tingkat daerah
	Mengadakan event budaya tahunan di tingkat daerah	Menguatkan pendidikan berbasis kearifan lokal melalui kurikulum sekolah
Misi 3 . Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur dari Desa Secara Merata		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata hingga ke wilayah desa	Percepatan pembangunan jalan di wilayah desa	Memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas antar wilayah
	Meningkatkan pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan di desa	Meningkatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan di wilayah pedesaan

Misi 4 . Memastikan Ketersediaan Kebutuhan Pokok dan Biaya Hidup Murah Melalui Kemandirian Pangan		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan kemandirian dan ketahanan pangan daerah.	Pengembangan kawasan pertanian produktif	Memperluas kawasan pertanian produktif dengan teknologi modern
	Meningkatkan akses masyarakat terhadap harga kebutuhan pokok yang terjangkau	Memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok melalui kebijakan logistik
Misi 5 . Memperluas Kesempatan Berusaha dan Menciptakan Lapangan Pekerjaan Melalui Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Pertanian, UMKM, dan Pariwisata		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi lokal	Pengembangan sektor pertanian berbasis teknologi dan inovasi	Meningkatkan produktivitas hasil pertanian dengan penerapan teknologi modern
	Peningkatan jumlah destinasi wisata berbasis kearifan lokal	Mengembangkan potensi wisata lokal dengan melibatkan masyarakat
Misi 6 . Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan	Pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor industri dan transportasi	Mendorong penerapan teknologi ramah lingkungan di sektor industri dan transportasi
	Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) untuk mendukung pelestarian lingkungan	Optimalisasi pengelolaan RTH sesuai dengan peraturan daerah

Sumber . Bappelitbangda Kabupaten Tana Toraja, 2025

Dalam rangka konsistensi antar rencana pembangunan mulai dari level nasional hingga Kabupaten/kota, maka dibutuhkan sinergitas dan sinkronisasi prioritas pembangunan. Adapun sinergitas dan sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Tana Toraja dengan Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini .

Tabel 3. 2

Sinergitas dan Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Tana Toraja dengan Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan dan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

KAB. TANA TORAJA	PROVINSI	NASIONAL
PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2025		
1. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan yang tangkas dan Dinamis melalui transformasi digital	Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	PN 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
		PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba
2. Memerkuat Pembangunan SDM yang Sehat, Cerdas, Produktif dan BErbudaya	Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	PN 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas
3. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur dari Desa secara Merata	Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	PN 6 . Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Kemiskinan
4. Memastikan Ketersediaan Kebutuhan Pokok dan Biaya Hidup Murah Melalui Kemandirian Pangan	Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	PN 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro- maritim industri sentra produksi melalui peran aktif konerasi
		PN 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
5. Memperluas Kesempatan Berusaha dan Menciptakan Lapangan Pekerjaan Melalui		PN 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, hijau, dan ekonomi biru

Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Pertanian, UMKM, Dan Pariwisata		
6. Mewujudkan Lingkungan Hidup Berualitas	Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	PN 8 . Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Sumber . Bappelitbangda Kabupaten Tana Toraja, 2025

Tabel 3. 3

Keselarasan Sasaran Pembangunan Daerah terhadap Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

No.	Pembangunan Daerah		Pembangunan Nasional	
	Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional
1.	Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan yang tangkas dan dinamis melalui transformasi digital;	1. Indeks reformasi birokrasi 2. Predikat SAKIP 3. Opini BPK 4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan public 5. Indeks Inovasi Daerah 6. Indeks SPBE	PN 1. Memperkokoh ideology Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Indeks Demokrasi Indonesia
			PN 7 . Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan Penyelundupan	1. Return on Aset (ROA) BUMN (%) 2. Indeks Integritas Nasional 3. Indeks Materi Hukum 4. Indeks Pelayanan Publik 5. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 6. Indeks Persepsi Korupsi 7. Indeks Pembangunan Hukum 8. Rasioa Perpajakan terhadap PDB (%) 9. Tingkat Inflasi (%)

2	Memperkuat Pembangunan SDM yang Sehat, CERdas, Produktif dan Berbudaya	1. Indeks Pembangunan Manusia 2. Indeks Kesehatan 3. Indeks Pembangunan Gender 4. Indeks Pendidikan 5. Indeks Pembangunan Kebudayaan 6. Persentase Benda, Bangunan Struktur dan situs Cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	PN 4 . Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	1. Hasil Pembelajaran a. Rata-rata nilai PISA b. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas (tahun) c. Harapan Lama Sekolah 2. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (%) 3. Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%) 4. Tingkat Penguasaan Iptek. a. Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB) b. Peringkat Indeks Inovasi Global 5. Usia Harapan Hidup (tahun) 6. Kesehatan Ibu dan Anak 7. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) 8. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) 9. Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) 10. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%) 11. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) 12. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
---	--	---	--	--

			PN 8 . Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	1. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) 2. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) 3. Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)
			PN 7 . Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan Penyelundupan	4.
3.	Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur dari Desa secara merata	1. Gini Ratio 2. Indeks Layanan Infrastruktur 3. Persentase Desa MAndiri	PN 3 . Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	

			PN 6 . Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	1. Terbangunnya sistem perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh penduduk (%) 13. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%) 14. Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (%) 15. Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap nasional (%) 16. Persentase desa mandiri (%) 17. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%)
	Memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan biaya hidup murah melalui kemandirian pangan	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi 2. Tingkat Kemiskinan 3. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB 4. Indeks Ketahanan pangan	PN 3 . Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%) 2. Rasio Kewirausahaan (%) 3. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%) 4. Rasio PDB Pariwisata (%) 5. Devisa Pariwisata (miliar USD) 6. Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%) 7. Aset Perbankan/PDB (%) 8. Aset Dana Pensiun/PDB (%) 9. Aset Asuransi/PDB (%) 10. Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%) 11. Total Kredit/ PDB (%) 12. Inklusi Keuangan (%)

			PN 5 . Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Rasio PDB Industri Pengolahan (%) 2. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB) 3. Ekspor Barang dan Jasa (% PDB) 4. Biaya Logistik (% PDB)
			PN 2 . Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	5.
5.	Memperluas Kesempatan Berusaha dan Menciptakan Lapangan Pekerjaan melalui Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Pertanian, UMKM, dan Pariwisata	1. Tingkat Pengangguran Terbuka 2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 3. PDRB Perkapita (AHDB) 4. Kunjungan Wisatawan	PN 2 . Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	1. Asia Power Index (Military Capability) 2. Asia Power Index (Diplomatic Influence) 3. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya 4. Prevalensi Ketidacukupan Pangan

				(PoU) 5. Indeks Ketahanan Energi 6. Kapasitas Tampung Air (m3/kapita) 7. Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%) 8. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%) 9. Indeks Ekonomi Hijau 10. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer 11. Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%) 12. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 13. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 14. Persentase Penurunan Emisi GRK • Tahunan (%) • Kumulatif (%) 15. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)
--	--	--	--	---

6.	Mewujudkan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan	1. IKLH 2. Penurunan intensitas Emisi GRK 3. Indeks Kualitas Air 4. Indeks Kualitas Udara 5. INdeks Resiko Bencana	PN 6 . Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	1. Terbangunnya sistem perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh penduduk (%) 2. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%) 3. Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (%) 4. Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap nasional (%) 5. Persentase desa mandiri (%)
			PN 2 . Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	6. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%)

Sumber . Bappelitbangda Kabupaten Tana Toraja, 2025

Tabel 3. 4 Sandingan Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2025 dan Perubahan RKPD Tahun 2025

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	RKPD Pokok Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025	Perangkat Daerah
					Target Kinerja	Proyeksi kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan public berbasis Teknologi informasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan keuangan pemerintahan	Program Pengelolaan Keuangan	Penandatanganan Persetujuan Bersama Ranperda APBD Pokok dan APBD Perubahan Tepat Waktu	100%	100%	BPKPD
				Penyampaian Laporan Keuangan Ke BPK RI Tepat Waktu	100%	100%	
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Yang Bersertifikat	65%	95%	BPKPD
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan PAD	5,50%	2%	BPKPD
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan perangkat daerah	100%	100%	Bappelitbangda

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	RKPD Pokok Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025	Perangkat Daerah
					Target Kinerja	Proyeksi kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Pembangunan Daerah				
			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Cakupan kemanfaatan penelitian dan pengembangan	100%	100%	Bappelitbangda
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindak lanjut Perangkat Daerah terhadap Hasil Pemeriksaan BPK-RI	75%		Inspektorat
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Perentase Kebijakan Pengawasan yang diakomodir menjadi Kebijakan Pengawasan Pemerintah Daerah	100%	100%	Inspektorat
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pesentase diklat yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan kompetensi	65%	65%	BKPSDM
				Persentase ASN berkinerja baik	100%	100%	BKPSDM

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	RKPD Pokok Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025	Perangkat Daerah
					Target Kinerja	Proyeksi kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Program Kepegawaian Daerah	Persentase ASN yang menduduki jabatan structural	96%	96%	SEKRETARIAT DAERAH
			Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang diimplementasikan sesuai rencana	100%	100%	
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Memiliki RPJMDes, RKPDDes, dan APBDDes dan BUMDES	100%	100%	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada seluruh lapisan masyarakat	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP (Tepat Waktu)	99.13%		Dinas PM & PTSP
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan)	85		Kecamatan
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah temuan inspektorat saat audit kinerja pemerintah desa	8		Kecamatan

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	RKPD Pokok Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025	Perangkat Daerah
					Target Kinerja	Proyeksi kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Program Pencatatan Sipil	Persentase Anak 0-18 Tahun berakta kelahiran	85%	60%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase pasangan berakta perkawinan	98%	85%	
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Kecamatan yang melakukan Pelayanan Online Administrasi Kependudukan	100%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase lembaga yang melakukan kerja sama pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan public	100%		
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase perangkat daerah yang mengelola aplikasi informatika	100%	100%	Dinas Komunikasi, Informatika & Persandian

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	RKPD Pokok Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025	Perangkat Daerah
					Target Kinerja	Proyeksi kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya kualitas dan akses layanan kesehatan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	100%		Dinas Kesehatan
				Persentase penduduk/warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	100%		
				Cakupan Pemberian PMT Balita	100%		
				Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%		
				Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	RKPD Pokok Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025	Perangkat Daerah
					Target Kinerja	Proyeksi kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase cakupan pelayanan Bayi dan Balita	100%		
				Cakupan Puskesmas	110,53		
				IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Rumah Sakit	100		RSUD Laki Padada
				Persentase pencapaian SPM Rumah Sakit	99,00%		
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Fasyankes yang Memiliki Tenaga Sesuai Permenkes 43 Tahun 2009	95%	100%	Dinas Kesehatan
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Ketersediaan Alat Kesehatan di Puskesmas	100%	100%	Dinas Kesehatan
				Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	100%	100%	

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	RKPD Pokok Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025	Perangkat Daerah
					Target Kinerja	Proyeksi kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Puskesmas melaksanakan upaya promkes, advokasi & pemberdayaan masyarakat	100%	100%	Dinas Kesehatan
			Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Lembaga kesejahteraan sosial yang dibina	100%	100%	Dinas Sosial
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Warga Negara Korban Bencana Kab/Kota yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	100%	100%	Dinas Sosial
			Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	100%		Dinas Sosial
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga	60%	100%	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	RKPD Pokok Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025	Perangkat Daerah
					Target Kinerja	Proyeksi kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Program Pengendalian Penduduk	Cakupan kecamatan yang mendapatkan fasilitasi pembinaan penanganan terpadu isu kependudukan di Kampung KB	100%	100%	DPPPA, PPKB
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase PUS peserta KB Aktif	69,60%	69,60%	DPPPA, PPKB
			Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIKR dan UPPKAS) di Setiap Kecamatan	100%	100%	DPPPA, PPKB
3	Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan	Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat dan minat baca masyarakat	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase pendidikan dasar yang menerapkan kurikulum muatan lokal	100%	100%	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/ D-IV	90,28%	89,83%	Dinas Pendidikan & Kebudayaan

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	RKPD Pokok Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025	Perangkat Daerah
					Target Kinerja	Proyeksi kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100%	100%	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
				Persentase jumlah warga negara usia 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	100%	
				Persentase Warga Negara Usia 5 -6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	100%	100%	
			Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase pengendalian perizinan PAUD, pendidikan non formal dan pendidikan dasar yang terlayani	100%	100%	Dinas Pendidikan & Kebudayaan

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	RKPD Pokok Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025	Perangkat Daerah
					Target Kinerja	Proyeksi kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase peningkatan Pengunjung Perpustakaan	20,67%	20,67%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Program Pengelolaan Arsip	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelolah Arsip Secara Baku	98%	98%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase dokumen arsip daerah yang diamankan dan dilestarikan	100%	100%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,7	74,05%	DPPPA, PPKB
			Program Perlindungan Perempuan	Persentase Korban kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	80%	80%	DPPPA, PPKB
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase kecamatan yg menyediakan layanan pembelajaran keluarga	100%	-	DPPPA, PPKB
			Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase OPD yang menyediakan data gender dan anak yang terupdate	80%	80%	DPPPA, PPKB

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	RKPD Pokok Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025	Perangkat Daerah
					Target Kinerja	Proyeksi kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase kecamatan yang memiliki forum anak	100%	100%	DPPPA, PPKB
4	Peningkatan ekonomi dan pemberdayaan usaha masyarakat	Meningkatnya sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi Padi (Ton)	186,182		Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
				Produksi Jagung (Ton)	13,538		
				Produksi Kopi (Ton)	4,36		
				Produksi Kakao (Ton)	1,442		
				Produktivitas Padi (Ton/Ha)	6,75		
				Produktivitas Jagung (Ton/Ha)	7,5		
				Produksi Daging Kerbau (Kg)	395,808		
				Produksi Daging Sapi (Kg)	47,148		
				Produksi Daging Babi (Kg)	918,855		
				Produksi Telur (Kg)	710,265		
				Persentase penggunaan benih padi bersertifikat	10,90%		

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	RKPD Pokok Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025	Perangkat Daerah
					Target Kinerja	Proyeksi kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jumlah Penggunaan Varietas Kopi Lokal Toraya Bersertifikasi	0		
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian (Unit)	41,67%	48 Unit	
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Unit)	20		Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit (Unit)	10		
			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase penurunan serangan OPT	10%	10%	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	RKPD Pokok Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025	Perangkat Daerah
					Target Kinerja	Proyeksi kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase unit usaha yang memiliki rekomendasi usaha obat hewan	100%	-	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
			Program pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan kasus penyakit hewan menular	20%	20%	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
			Program Penyuluhan Pertanian	Persentase ketersediaan penyuluh pertanian dan pelaku utama petani/KEP	1,30%	0,30%	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
				Persentase ketersediaan penyuluh terhadap kelompok tani/ternak	6,25%	6,25%	

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	RKPD Pokok Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025	Perangkat Daerah
					Target Kinerja	Proyeksi kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase kecamatan yang memiliki kelompok Pengelola Infrastruktur pendukung kemandirian pangan	47,40%	0%	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Cakupan Desa/ Kelurahan yang menerapkan Rumah Pangan Lestari	57,86%		Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Cakupan Wilayah Kecamatan pelaksanaan pengawasan	89,50%	0%	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	761 Ton	741 Ton	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	RKPD Pokok Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025	Perangkat Daerah
					Target Kinerja	Proyeksi kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produk perikanan yang dipasarkan	4935 Ton		Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	27 Ton		Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Meningkatnya sektor UMKM, industry rumah tangga, ekonomi kreatif, daya saing koperasi serta daya saing dan investasi daerah	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase perusahaan yang taat terhadap ketentuan penanaman modal	100%		Dinas PM & PTSP
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Potensi Investasi yang dikelola	100%	-	Dinas PM & PTSP
			Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Realisasi Investasi PMDN/PMA	13%	-	Dinas PM & PTSP

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	RKPD Pokok Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025	Perangkat Daerah
					Target Kinerja	Proyeksi kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang terfasilitasi Pengembangan Usaha	2,17%	2,17%	Dinas Koperasi & UKM,
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang terfasilitasi untuk diberdayakan	17,24%	17,24%	Dinas Koperasi & UKM, Perdagangan
			Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Koperasi Simpan Pinjam yang difasilitasi Izin usaha	0,90%	0,90%	Dinas Koperasi & UKM, Perdagangan
			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi dalam pengawasan dan pemeriksaan	5,75%	5,75%	Dinas Koperasi & UKM, Perdagangan
			Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi yang memiliki kategori SEHAT	17,17%	17,14%	Dinas Koperasi & UKM, Perdagangan
			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Koperasi	11,43%	15%	Dinas Koperasi & UKM, Perdagangan

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	RKPD Pokok Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025	Perangkat Daerah
					Target Kinerja	Proyeksi kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase kawasan perdesaan yang dibangun pada kecamatan	58%		DPML
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	99,13%	100%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	98,26%	100%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketengakerjaan	100%	100%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase penempatan transmigrasi	100%	90%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Laju pertumbuhan sarana distribusi perdagangan	2.87	2,87%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	RKPD Pokok Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025	Perangkat Daerah
					Target Kinerja	Proyeksi kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase UTTP yang Di Tera	32,25%	25%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Cakupan penyebaran informasi harga barang kebutuhan pokok	82,21%	84,21%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase produk unggulan yang dipasarkan	55,56%		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase kelompok industri yang terfasilitasi	41,18%	41,18%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Perusahaan yang Memiliki Izin	57,83%	34,83%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	RKPD Pokok Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025	Perangkat Daerah
					Target Kinerja	Proyeksi kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Produk Ekonomi Kreatif yang Terdaftar sebagai Hak Kekayaan Intelektual	1 Produk	100%	Dinas Pariwisata, Kepemudaan & Olahraga
			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	100%	100%	Dinas Sosial
				Persentase usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro yang diberdayakan	3,86%	3,86%	Dinas Koperasi & UKM
5	Pengembangan potensi pariwisata dengan tetap memperhatikan	Meningkatnya pengembangan kepariwisataan yang variatif	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Daerah Tujuan Wisata (DTW)/Objek Wisata yang Dipromosikan	100%	100%	Dinas Pariwisata, Kepemudaan & Olahraga

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	RKPD Pokok Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025	Perangkat Daerah
					Target Kinerja	Proyeksi kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8
	keberlanjutan lingkungan hidup	dan inovatif berbasis kearifan adat-budaya serta sumber daya alam pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Kecamatan yang memiliki kawasan wisata unggulan	100%	100%	Dinas Pariwisata, Kepemudaan & Olahraga
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase POKDARWIS yang ada pada setiap Daerah Tujuan Wisata (DTW)/Objek Wisata	100%	100%	Dinas Pariwisata, Kepemudaan & Olahraga
			Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	100%	100%	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
			Program Pembinaan Sejarah	Persentase sejarah lokal yang disusun/dibuku kan	80%	-	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	33,06%	100%	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	47,66%		Dinas Pendidikan & Kebudayaan

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	RKPD Pokok Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025	Perangkat Daerah
					Target Kinerja	Proyeksi kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup yang sehat, tertata, terpadu serta kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	53	53	Dinas Lingkungan Hidup
				Indeks Kualitas Udara	89.97	87,27%	
			Lingkungan Hidup	dokumen perencanaan lingkungan hidup	60%	100%	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Tingkat pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KeHaTi)			
			Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Jumlah Sampah yang tertangani Melalui 3R	17.64%	26,68%	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Cakupan Limbah B3 Fasus/Fasos/Usaha yang diawasi	22.00%		Dinas Lingkungan Hidup

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	RKPD Pokok Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025	Perangkat Daerah
					Target Kinerja	Proyeksi kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan dalam Pengelolaan Lingkungan	30.00%	30%	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Persentase fasilitasi pendampingan MHA, Kearifan Lokal dan Hak MHA	19.04%	-	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Cakupan Lembaga atau Kelompok Masyarakat yang di tingkatkan kapasitasnya	71.42%		Dinas Lingkungan Hidup

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	RKPD Pokok Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025	Perangkat Daerah
					Target Kinerja	Proyeksi kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Cakupan rekomendasi penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%	-	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Sampah yang Tertangani	43.27%	43,27%	Dinas PUPR
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase warga Negara yang memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kab./Kota	100%	67%	Dinas PUPR

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	RKPD Pokok Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025	Perangkat Daerah
					Target Kinerja	Proyeksi kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan peningkatan prasarana, sarana dan fasilitas umum pada kawasan kota penyangga	83.33%	20%	Dinas PRKP
			Program Penanggulangan Bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	
				Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%	100%	BPBD

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	RKPD Pokok Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025	Perangkat Daerah
					Target Kinerja	Proyeksi kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%	100%	SATPOL PP & PK
6	Menguatkan interkoneksi antar wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur daerah serta sarana prasarana publik vital	Program Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	94,11%	95,32%	Dinas PRKP
			Program Penyelenggaraan Jalan	Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	79,83%	79,83%	Dinas PUTR
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Air Tidak Tersumbat	43,20%	43,20%	Dinas PUTR
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Cakupan prasarana LLAJ dalam kondisi baik	82%	80%	Dinas Perhubungan
				Jumlah Orang Melalui Terminal per Tahun	2.324. 129 Orang	82%	

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	RKPD Pokok Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025	Perangkat Daerah
					Target Kinerja	Proyeksi kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Program Penataan Desa		89%	-	DPML
			Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi public, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	90%	90%	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	89,91%	55%	Dinas PRKP
			Program Pengembangan Perumahan	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	100%	100%	Dinas PRKP
			Program Pengembangan Permukiman	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	0,07%		Dinas PUPR
			Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Pemerintah yang tertata dengan Baik	94%	94%	Dinas PUPR

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	RKPD Pokok Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025	Perangkat Daerah
					Target Kinerja	Proyeksi kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jumlah kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru yang dilakukan penataan bangunan dan lingkungannya	4 Kws.	1 Kws.	Dinas PUPR
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah penerbitan rekomendasi izin peruntukan penggunaan tanah/lahan	65 Rek.	65 Rek.	Dinas PUPR
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	65,07%	65,07%	Dinas PUTR
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Warga Negara yang memperoleh Kebutuhan air minum curah Lintas Kabupaten/Kota	100%	88,12%	Dinas PUTR

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	RKPD Pokok Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025	Perangkat Daerah
					Target Kinerja	Proyeksi kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Mewujudkan tata kehidupan sosial yang harmonis, toleran dan saling menghormati	Terwujudnya Penegakan Perundang-undangan Ketentraman,	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila Karakter Kebangsaan	95%		Kantor Kesbangpol
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Cakupan Kegiatan Kewaspadaan dini dan penanganan konflik	100%		Kantor Kesbangpol
			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya yang tepat sasaran	100%		Kantor Kesbangpol

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	RKPD Pokok Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025	Perangkat Daerah
					Target Kinerja	Proyeksi kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi	70%		Kantor Kesbangpol
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Cakupan Pembinaan Kepemudaan	78%	100%	Dinas Pariwisata, Kepemudaan & Olahraga
			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Peningkatan SDM Kepramukaan	85%	100%	Dinas Pariwisata, Kepemudaan & Olahraga
			Program Peningkatan Peran Partai POLITIK dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Capaian kegiatan peningkatan peran partai politik dan pendidikan politik	100%		Kantor Kesbangpol

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	RKPD Pokok Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025	Perangkat Daerah
					Target Kinerja	Proyeksi kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase PROLEGDA yang terealisasi	100%	100%	Sekretariat DPRD
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Persentase Jumlah Urusan Pemerintahan yang difasilitasi, dimonitoring, dan dievaluasi	100%	100%	Sekretariat Daerah
				Persentase kebijakan Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan sesuai rencana	100%	100%	
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase kelembagaan lembaga kemasyarakatan lembang/kelurahan yang difasilitasi dan dibina	75%	75	DPML

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	RKPD Pokok Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025	Perangkat Daerah
					Target Kinerja	Proyeksi kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada di Kabupaten	100%		SATPOL PP & PK

BAB IV

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Perubahan Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2025, untuk prioritas dan plafon anggaran sementara masing-masing urusan dan Perangkat Daerah tercantum pada Lampiran I dan tabel berikut ini.

Label 4.1 Rekapitulasi Perubahan Plafon Anggaran Sementara pada masing-masing SKPD Tahun Anggaran 2025

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
01.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	386.113.180.000,00	387.961.372.727,00	1.848.192.727,00
01.02.01	Dinas Kesehatan	150.515.777.000,00	152.167.166.537,00	1.651.389.537,00
01.02.02	Rumah Sakit Umum Lakipadada	122.576.025.000,00	135.678.737.538,74	13.102.712.538,74
01.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	109.372.526.000,00	104.272.360.553,00	(5.100.165.447,00)
01.04.01	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3.562.131.000,00	3.716.016.800,00	153.885.800,00
01.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	9.772.866.000,00	7.257.800.300,00	(2.515.065.700,00)
01.05.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12.211.088.000,00	12.081.004.800,00	(130.083.200,00)
01.06.01	Dinas Sosial	3.383.631.000,00	2.956.384.100,00	(427.246.900,00)
02.07.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.622.101.000,00	2.386.663.800,00	(235.437.200,00)
02.08.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.474.188.000,00	10.860.921.600,00	(613.266.400,00)
02.09.01	Dinas Lingkungan Hidup	7.267.958.000,00	17.006.150.200,00	9.738.192.200,00

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
02.11.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.495.290.000,00	4.297.920.600,00	(197.369.400,00)
02.12.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang	4.015.628.000,00	3.450.283.000,00	(565.345.000,00)
02.13.01	Dinas Perhubungan	5.381.166.000,00	5.448.014.800,00	66.848.800,00
02.15.01	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	4.677.119.000,00	4.302.816.300,00	(374.302.700,00)
02.16.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	6.978.826.000,00	6.353.220.100,00	(625.605.900,00)
02.17.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.188.237.000,00	2.096.461.000,00	(91.776.000,00)
02.18.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.054.236.000,00	2.636.892.000,00	(417.344.000,00)
02.23.01	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	6.736.761.000,00	7.752.801.950,00	1.016.040.950,00
03.26.01	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	16.891.697.000,00	17.563.395.500,00	671.698.500,00
04.01.01	Sekretariat Daerah	33.984.337.000,00	32.266.345.120,00	(1.717.991.880,00)
04.02.01	Sekretariat DPRD	28.174.488.000,00	28.174.488.000,00	-
05.01.01	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	5.606.163.000,00	5.213.014.800,00	(393.148.200,00)
05.02.01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	256.576.617.000,00	237.366.417.456,47	(19.210.199.543,53)
05.03.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.709.782.000,00	5.274.138.700,00	(435.643.300,00)
06.01.01	Inspektorat Daerah	15.361.192.000,00	15.424.009.000,00	62.817.000,00
07.01.01	Kecamatan Makale	10.853.114.000,00	10.521.689.072,00	(331.424.928,00)
07.01.02	Kecamatan Makale Utara	3.424.984.000,00	3.485.639.702,00	60.655.702,00
07.01.03	Kecamatan Makale Selatan	3.796.264.000,00	3.872.415.321,00	76.151.321,00
07.01.04	Kecamatan Sangalla	2.295.975.000,00	2.413.933.083,00	117.958.083,00

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
07.01.05	Kecamatan Sangalla Utara	2.676.345.000,00	2.464.098.861,00	(212.246.139,00)
07.01.06	Kecamatan Sangalla Selatan	1.739.028.000,00	1.598.953.642,00	(140.074.358,00)
07.01.07	Kecamatan Mengkendek	4.951.462.000,00	4.610.593.998,00	(340.868.002,00)
07.01.08	Kecamatan Gandang Batu Sillanan	3.803.602.000,00	3.743.912.164,00	(59.689.836,00)
07.01.09	Kecamatan Saluputti	1.803.728.000,00	1.668.482.360,00	(135.245.640,00)
07.01.10	Kecamatan Rembon	2.683.320.000,00	2.560.926.051,00	(122.393.949,00)
07.01.11	Kecamatan Malimbong Balepe'	1.557.821.000,00	1.609.337.443,00	51.516.443,00
07.01.12	Kecamatan Rantetayo	2.979.455.000,00	3.046.318.696,00	66.863.696,00
07.01.13	Kecamatan Kurra	1.810.099.000,00	1.986.252.988,00	176.153.988,00
07.01.14	Kecamatan Bonggakaradeng	1.609.468.000,00	1.553.872.927,00	(55.595.073,00)
07.01.15	Kecamatan Rano	987.074.000,00	967.784.368,00	(19.289.632,00)
07.01.16	Kecamatan Bittuang	1.733.159.000,00	1.701.604.468,00	(31.554.532,00)
07.01.17	Kecamatan Masanda	867.202.000,00	813.078.907,00	(54.123.093,00)
07.01.18	Kecamatan Simbuang	1.479.040.000,00	1.364.554.678,00	(114.485.322,00)
07.01.19	Kecamatan Mappak	1.735.096.000,00	1.656.943.113,00	(78.152.887,00)
08.01.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.569.872.000,00	7.201.884.400,00	(367.987.600,00)
JUMLAH ANGGARAN		1.279.059.118.000,00	1.272.807.073.524,21	(6.252.044.475,79)

Rincian pada masing-masing Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan lebih dijelaskan pada lampiran I (Satu) Rekapitulasi Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Subkegiatan Daerah Perubahan PPAS Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 yang menjadi satu kesatuan dengan dokumen ini.

4.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa struktur APBD berdasarkan kelompok belanja terdiri atas Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Belanja Operasional mempunyai rincian jenis Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Sedangkan Belanja Modal terinci dalam Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Belanja Modal Irigasi dan Jaringan, Belanja Modal Aset Tetap lainnya dan Belanja Modal Aset lainnya serta untuk belanja transfer dengan rincian belanja transfer Dana Lembang, Dana alokasi Lembang, Dana bagi hasil ke Lembang. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atas Struktur Belanja APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut.

Tabel 4. 1 Perubahan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Objek Belanja

Kode Rekening	Uraian	APBD Induk 2025 (Rp.)	Perubahan APBD 2025 (Rp.)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp.)	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6=(5/3)
5 .	BELANJA DAERAH				
5.1.	Belanja Operasi	938.762.345.395,00	933.199.128.752,21	(5.563.216.642,79)	-0,59%
5.1.01.	Belanja Pegawai	586.080.189.036,00	567.765.141.842,00	(18.315.047.194,00)	-3,13%
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	301.027.577.824,00	301.491.126.975,21	463.549.151,21	0,15%
5.1.03.	Belanja Bunga	-	-	0,00	0,00%
5.1.04.	Belanja Subsidi	203.904.500,00	248.101.500,00	44.197.000,00	100,00%
5.1.05.	Belanja Hibah	51.325.924.035,00	63.578.924.435,00	12.253.000.400,00	23,87%
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	124.750.000,00	115.834.000,00	(8.916.000,00)	-7,15%
5.2.	Belanja Modal	164.694.003.605,00	172.803.355.772,00	8.109.352.167,00	4,92%
5.2.01.	Belanja Tanah	-	-	0,00	0,00%
5.2.02.	Belanja Peralatan dan Mesin	26.473.540.750,00	24.981.237.345,00	(1.492.303.405,00)	-5,64%

Kode Rekening	Uraian	APBD Induk 2025 (Rp.)	Perubahan APBD 2025 (Rp.)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp.)	%
5.2.03.	Belanja Gedung dan Bangunan	63.047.504.407,00	70.984.409.979,00	7.936.905.572,00	12,59%
5.2.04.	Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan	71.589.855.000,00	73.228.101.000,00	1.638.246.000,00	2,29%
5.2.05.	Belanja Aset Tetap Lainnya	3.273.103.448,00	3.299.607.448,00	26.504.000,00	0,81%
5.2.06.	Belanja Aset Modal Lainnya	310.000.000,00	310.000.000,00	0,00	0,00%
5.3.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	5.000.000.000,00	(5.000.000.000,00)	-50,00%
5.4.	Belanja Transfer	165.602.769.000,00	161.804.589.000,00	(3.798.180.000,00)	-2,29%
5.4.01	Belanja Bagi Hasil ke Desa	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	0,00	0,00%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	164.002.769.000,00	160.204.589.000,00	(3.798.180.000,00)	-2,32%
JUMLAH BELANJA DAERAH		1.279.059.118.000,00	1.272.807.073.524,21	(6.252.044.475,79)	-0,49%

BAB V

RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud, terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Pada Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja akan merencanakan pelaksanaan Pembiayaan Daerah baik Penerimaan Pembiayaan yang bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya maupun Pengeluaran Pembiayaan untuk menambah penyertaan Modal BUMD.

Perubahan Plafon Anggaran Sementara pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 dapat dijelaskan pada Tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5. 1 Perubahan Plafon Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun 2025

Kode. Rek	Uraian	APBD Induk 2025 (Rp.)	Perubahan APBD 2025 (Rp.)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp.)	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6=(5/3)
6.	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	39.925.772.000,00	95.561.369.771,21	55.635.597.771,21	139,35%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	39.925.772.000,00	95.561.369.771,21	55.635.597.771,21	139,35%
6.02.	Pengeluaran Pembiayaan				
6.2.03.	Penyertaan Modal pada Bank SULSELBAR				
PEMBIAYAAN NETTO		39.925.772.000,00	95.561.369.771,21	55.635.597.771,21	139,35%

BAB VI

PENUTUP

Demikianlah Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025 untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025.

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 antara Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tana Toraja dan menjadi pedoman dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Makale, 29 Agustus 2025
BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG



**Lampiran I. Rekapitulasi Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan
Sub kegiatan Setiap OPD**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	4
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	387.961.372.727,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
	1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
	1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	
	1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
	1.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
	1.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
	1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
	1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	1.01.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	
	1.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
	1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
	1.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	1.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	1.01.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
	1.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
	1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
	1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
	1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	
	1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	1.01.02.2.01.0015	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
	1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	
	1.01.02.2.01.0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	
	1.01.02.2.01.0033	Pemeliharaan Mebel Sekolah	
	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	
	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	
	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	
	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
	1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
	1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	
	1.01.02.2.02.0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	
	1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
	1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	
	1.01.02.2.02.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	
	1.01.02.2.02.0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	
	1.01.02.2.02.0026	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
	1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	
	1.01.02.2.02.0046	Pemeliharaan Mebel Sekolah	
	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	
	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	
	1.01.02.2.03.0008	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	
	1.01.02.2.03.0020	Pemeliharaan Mebel Sekolah	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	1.01.02.2.03.0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	
	1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
	1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	
	1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	
	1.01.02.2.03.0035	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	
	1.01.02.2.03.0036	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	
	1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
	1.01.02.2.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	
	1.01.02.2.03.0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
	1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	1.01.02.2.04.0035	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	
	1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
	1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	
	1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah	
	1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	
3.	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
	1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
	1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
	1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
4.	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
5.	1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	
	1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
	1.01.05.2.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
	1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	
1.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	
	2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	
	2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	
	2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	
2.	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	
	2.22.03.2.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	
	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	
3.	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	
	2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	
4.	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	
	2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	
	2.22.05.2.03	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	2.22.05.2.03.0001	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
5.	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	
	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	
	2.22.06.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	
	2.22.06.2.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	2.22.06.2.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	
	2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	
		DINAS KESEHATAN	152.167.166.537,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
	1.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
	1.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
	1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
	1.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	1.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	1.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
	1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	
	1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	
	1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	
	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	
	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
4.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	
	1.02.04.2.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
	1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	
	1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	
5.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	
	1.02.05.2.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	
		RSUD LAKIPADADA	135.678.737.538,74
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	104.272.360.553,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
	1.03.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
	1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
	1.03.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
	1.03.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
	1.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	
	1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	1.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	1.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar	
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	1.03.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
	1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
	1.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
	1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	1.03.02.2.01.0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	
	1.03.02.2.01.0107	Pembangunan Unit Air Baku	
	1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	
	1.03.02.2.01.0110	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	
	1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai	
	1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	
	1.03.02.2.02.0003	Pembangunan Bendung Irigasi	
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	
	1.03.02.2.02.0009	Peningkatan Bendung Irigasi	
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	
	1.03.02.2.02.0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi	
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	
	1.03.02.2.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	
	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	
3.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
	1.03.03.2.01.0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
4.	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	
	1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	
	1.03.04.2.01.0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	
	1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	
	1.03.04.2.01.0016	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	
	1.03.04.2.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	
5.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	1.03.05.2.01.0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	
	1.03.05.2.01.0021	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	
	1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	
	1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	
	1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
6.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	
	1.03.06.2.01.0026	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	
	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	
	1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	
	1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	
7.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	
	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
	1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	
8.	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	
	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
9.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
	1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan	
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	
	1.03.10.2.01.0031	Penggantian Jembatan	
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	
	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	
	1.03.10.2.01.0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar	
	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	
	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	
10.	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	
	1.03.11.2.01.0009	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	
	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	
	1.03.11.2.01.0012	Penyediaan instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	1.03.11.2.02.0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	
	1.03.11.2.02.0014	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	
	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	
	1.03.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	
	1.03.11.2.04.0008	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	
11.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	
	1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	
	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	
	1.03.12.2.01.0009	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	
	1.03.12.2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	
	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
	1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	
	1.03.12.2.02.0007	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
	1.03.12.2.04.0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	
		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	3.716.016.800,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	1.04.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
	1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
	1.04.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	1.04.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	1.04.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	1.04.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	1.04.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
	1.04.02.2.01.0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
	1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	
3.	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP	
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	
4.	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
5.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	
	1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	7.257.800.300,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
2.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
3.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	1.05.04.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	12.081.004.800,00
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
2.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	
	1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	
	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	
	1.05.03.2.02.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	
	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	
	1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	
	1.05.03.2.02.0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	
	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
	1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
	1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	
	1.05.03.2.04.0007	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
	1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	
	1.05.03.2.04.0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	
	1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	
	1.05.03.2.04.0016	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	
		DINAS SOSIAL	2.956.384.100,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	1.06.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
2.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
	1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	
	1.06.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	
	1.06.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
	1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	
3.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
	1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	
	1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	
4.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	
	1.06.05.2.01.0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
5.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	
		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2.386.663.800,00
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	2.07.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	2.07.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	2.07.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
2.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	
3.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja	
4.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	
1.	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	3.32.03.2.01.0006	Pelatihan Transmigrasi	
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	10.860.921.600,00
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
1.	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	2.08.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	2.08.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
2.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
	2.08.02.2.01.0005	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan kab/ kota	
	2.08.02.2.01.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
	2.08.02.2.01.0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
	2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	
	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
	2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
3.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	
	2.08.03.2.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	
	2.08.03.2.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
4.	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
	2.08.04.2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
	2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	2.08.04.2.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
5.	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	
6.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
	2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
7.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
	2.08.07.2.01.0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	
	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	
	2.08.07.2.01.0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	2.08.07.2.03.0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	
	2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	
	2.08.07.2.03.0008	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1.	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	2.08.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	2.08.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	
	2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	
	2.14.02.2.01.0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	
	2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	
	2.14.02.2.02.0016	Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten/kota	
3.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
	2.14.03.2.02.0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	
	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
	2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	
	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	
	2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB	
	2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	
4.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	
	2.14.04.2.01.0015	Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL	
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	17.006.150.200,00
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
2.11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	2.11.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	2.11.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	2.11.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	2.11.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	2.11.01.2.07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
	2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	2.11.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	2.11.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
	2.11.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2.	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	
	2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	
	2.11.02.2.01.0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	
	2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	
	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	
	2.11.02.2.02.0004	Pemantauan dan Evaluasi KLHS	
	2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	2.11.02.2.02.0006	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	
3.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	
	2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
	2.11.03.2.01.0009	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota	
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	
	2.11.03.2.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
	2.11.03.2.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	
4.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
	2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	2.11.04.2.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	
	2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	
5.	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	
	2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	
	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	
6.	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	
	2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
7.	2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	
	2.11.07.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	
	2.11.07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	
	2.11.07.2.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	
8.	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	
9.	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
		Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
10.	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	
	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	
	2.11.10.2.01.0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	
11.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	
	2.11.11.2.01.0009	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	
	2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui daur ulang sampah	
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.297.920.600,00
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
2.12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
1.	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	2.12.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
	2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
	2.12.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	2.12.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
	2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
	2.12.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
	2.12.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
	2.12.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	2.12.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
2.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	
	2.12.02.2.01.0003	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	
	2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	
	2.12.02.2.01.0006	Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	
	2.12.02.2.01.0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	
	2.12.02.2.01.0008	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	
	2.12.02.2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
	2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
	2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	
	2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	
	2.12.02.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	
	2.12.02.2.03.0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	
	2.12.02.2.03.0006	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	
	2.12.02.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	
	2.12.02.2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	
	2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
	2.12.02.2.04.0001	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
	2.12.02.2.04.0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	
	2.12.02.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	
3.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	
	2.12.03.2.01.0003	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	
	2.12.03.2.01.0004	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil	
	2.12.03.2.01.0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
	2.12.03.2.02.0001	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	
	2.12.03.2.02.0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	
	2.12.03.2.02.0003	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	
	2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	
	2.12.03.2.02.0005	Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil	
	2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	
	2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	2.12.03.2.02.0009	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	
	2.12.03.2.02.0010	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil	
	2.12.03.2.02.0011	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	
	2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
	2.12.03.2.03.0001	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	
	2.12.03.2.03.0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	
	2.12.03.2.03.0003	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	
	2.12.03.2.03.0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	
4.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	
	2.12.04.2.01.0003	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	
	2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	2.12.04.2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
	2.12.04.2.03.0001	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
	2.12.04.2.03.0002	Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri	
	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	
	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
	2.12.04.2.03.0006	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	
	2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	
	2.12.04.2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	
	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
	2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
	2.12.04.2.04.0002	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	
5.	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	
	2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG	3.450.283.000,00
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	2.13.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
	2.13.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	2.13.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
2.	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	
	2.13.02.2.01.0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	
	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	
3.	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
	2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	
	2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	
4.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	
	2.13.05.2.01.0011	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	
		DINAS PERHUBUNGAN	5.448.014.800,00
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
	2.15.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
	2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	2.15.02.2.14.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	
		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	4.302.816.300,00
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media	
	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	
	2.16.02.2.01.0016	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	
	2.16.02.2.01.0018	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	
	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	
	2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi	
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
	2.16.02.2.01.0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	
	2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten	
	2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
	2.16.03.2.02.0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	
	2.16.03.2.02.0014	Koordinasi penyusunan proses bisnis	
	2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	
	2.16.03.2.02.0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	
	2.16.03.2.02.0017	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	
	2.16.03.2.02.0018	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	
	2.16.03.2.02.0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	
	2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	
	2.16.03.2.02.0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	
	2.16.03.2.02.0022	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	
	2.16.03.2.02.0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	
	2.16.03.2.02.0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	
	2.16.03.2.02.0026	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	
	2.16.03.2.02.0027	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	
	2.16.03.2.02.0028	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	
	2.16.03.2.02.0029	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	
	2.16.03.2.02.0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	2.20.02.2.01.0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	
	2.20.02.2.01.0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	
	2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	
	2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	
	2.20.02.2.01.0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
	2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
	2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
	2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	6.353.220.100,00
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
1.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
	2.17.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	2.17.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	2.17.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
2.	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
3.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
4.	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
5.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	
6.	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	
7.	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	
	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	
	2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	
	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	
8.	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	
1.	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	
	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	
	3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	
2.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
3.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
4.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	
5.	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	
1.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
	3.31.02.2.01.0009	Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.096.461.000,00
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
2.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	
3.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	
4.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	
5.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2.636.892.000,00
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
2.23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	
1.	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	2.23.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
	2.23.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
	2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
	2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	2.23.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
	2.23.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
	2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
	2.23.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
	2.23.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
	2.23.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
	2.23.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
	2.23.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
	2.23.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
	2.23.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
	2.23.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	2.23.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
	2.23.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
	2.23.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
	2.23.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
	2.23.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	2.23.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
	2.23.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
	2.23.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	2.23.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
	2.23.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	2.23.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	2.23.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	2.23.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	
	2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	2.23.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
	2.23.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	2.23.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
	2.23.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
	2.23.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2.	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	
	2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	
1.	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	
	2.24.02.2.02.0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	
2.	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	
	2.24.03.2.01.0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	
	2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	
		DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	7.752.801.950,00
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	2.19.02.2.01.0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota	
	2.19.02.2.01.0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	
	2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	
	2.19.02.2.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	
	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	
	2.19.02.2.01.0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	
	2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	
2.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
	2.19.03.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	
	2.19.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	
	2.19.03.2.02.0005	Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota	
	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	
	2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah	
	2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	
	2.19.03.2.03.0008	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	
	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	
	2.19.03.2.03.0010	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	
	2.19.03.2.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	
	2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	
	2.19.03.2.05.0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	
	2.19.03.2.05.0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	2.19.03.2.05.0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	
	2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	
	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	
3.	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	
	2.19.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	
	2.19.04.2.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	
	2.19.04.2.01.0004	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota	
	2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	
	2.19.04.2.01.0006	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	
	2.19.04.2.01.0007	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	
	2.19.04.2.01.0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	
1.	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	3.26.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	3.26.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
	3.26.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
	3.26.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
	3.26.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
	3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	3.26.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
	3.26.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
	3.26.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
	3.26.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
	3.26.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
	3.26.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
	3.26.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
	3.26.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
	3.26.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
	3.26.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
	3.26.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	
	3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	3.26.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
	3.26.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
	3.26.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
	3.26.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
	3.26.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	3.26.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
	3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	3.26.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
	3.26.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	
	3.26.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	3.26.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
	3.26.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	3.26.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	3.26.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	3.26.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	
	3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	3.26.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
	3.26.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	
	3.26.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	3.26.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	3.26.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	
	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	3.26.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
	3.26.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
	3.26.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	
	3.26.02.2.01.0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
	3.26.02.2.01.0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
	3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	
	3.26.02.2.01.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
	3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
	3.26.02.2.02.0001	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
	3.26.02.2.02.0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
	3.26.02.2.02.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
	3.26.02.2.02.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
	3.26.02.2.02.0009	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
	3.26.02.2.03.0001	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
	3.26.02.2.03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
	3.26.02.2.03.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	
	3.26.02.2.04.0011	Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota	
	3.26.02.2.04.0012	Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	
3.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	3.26.03.2.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	
4.	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	
	3.26.04.2.01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	
	3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	
	3.26.04.2.02.0003	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	
	3.26.04.2.02.0005	Pengembangan Sistem Pemasaran	
	3.26.04.2.02.0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	
	3.26.04.2.02.0011	Fasilitasi pemberian insentif	
	3.26.04.2.02.0013	Bantuan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (Banper)	
	3.26.04.2.02.0016	Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	
	3.26.04.2.02.0017	Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif	
	3.26.04.2.02.0018	Penyusunan Skema Insentif Daerah	
	3.26.04.2.02.0019	Formulasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	
	3.26.04.2.02.0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	
	3.26.04.2.02.0021	Perlindungan Hasil Kreativitas	
	3.26.04.2.02.0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	
5.	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	
	3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	
	3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	
	3.26.05.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	
	3.26.05.2.01.0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	
	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	
	3.26.05.2.02.0002	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	
	3.26.05.2.02.0007	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	
		DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	17.563.395.500,00
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	
1.	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	
2.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
	2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
3.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	
4.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	
1.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
	3.27.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
	3.27.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
	3.27.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
	3	NON URUSAN	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	
	3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	
	3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
	3.27.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
	3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
	3.27.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	3.27.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
	3.27.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
	3.27.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	3.27.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
	3.27.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
	3.27.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	3.27.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	3.27.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	3.27.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
1.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	
	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	
	3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	
	3.27.02.2.04.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	
	3.27.02.2.04.0002	Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	3.27.02.2.05.0002	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	
	3.27.02.2.05.0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	
	3.27.02.2.05.0007	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	3.27.02.2.05.0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	
	3.27.02.2.06.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	
2.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	
	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	
	3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	
	3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	
	3.27.03.2.02.0006	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	
	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	
	3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
	3.27.03.2.03.0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	3.27.03.2.03.0002	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	
	3.27.03.2.04	Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	
	3.27.03.2.04.0001	Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum	
	3.27.03.2.04.0002	Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum	
	3.27.03.2.04.0003	Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	
3.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	
	3.27.04.2.04.0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	
4.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
	3.27.05.2.01.0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
5.	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	3.27.06.2.01.0001	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	
	3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	
	3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	
	3.27.06.2.02.0001	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	
	3.27.06.2.02.0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	
	3.27.06.2.02.0003	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan	
6.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	
		SEKRETARIAT DAERAH	32.266.345.120,00
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
	4.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
	4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
	4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	4.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
	4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahaan Sekretarisat Daerah	
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	
2.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	
3.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	4.01.03.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	
		SEKRETARIAT DPRD	28.174.488.000,00
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD	
1.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
	4.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	4.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	
2.	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	
	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.213.014.800,00
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
	5.01	PERENCANAAN	
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
	5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
2.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.02.2.03.0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
3.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
1.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	
	5.05.02.2.01.0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	
	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	
	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	
	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	
		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	237.366.417.456,47

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
	5.02	KEUANGAN	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
	5.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
	5.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
	5.02.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
	5.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	5.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	
	5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	5.02.02.2.04.0007	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	
	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	
	5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	
	5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
4.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.274.138.700,00
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
	5.03	KEPEGAWAIAN	
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
	5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
	5.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
	5.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	5.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	5.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	
	5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	
	5.03.02.2.03.0003	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	
	5.03.02.2.03.0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	
	5.03.02.2.03.0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	
	5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
1.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	
		INSPEKTORAT DAERAH	15.424.009.000,00
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
	6.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
	6.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	6.01.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
2.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	
		KECAMATAN MAKALE	10.521.689.072,00
	7	UNSUR KEWILAYAHAN	
	7.01	KECAMATAN	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
		KECAMATAN MAKALE UTARA	3.485.639.702,00
	7	UNSUR KEWILAYAHAN	
	7.01	KECAMATAN	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		KECAMATAN MAKALE SELATAN	3.872.415.321,00
	7	UNSUR KEWILAYAHAN	
	7.01	KECAMATAN	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	7	NON URUSAN	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN	
	7.01	KECAMATAN	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
		KECAMATAN SANGALLA'	2.413.933.083,00
	7	UNSUR KEWILAYAHAN	
	7.01	KECAMATAN	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
		KECAMATAN SANGALLA' UTARA	2.464.098.861,40
	7	UNSUR KEWILAYAHAN	
	7.01	KECAMATAN	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
4.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
		KECAMATAN SANGALLA' SELATAN	1.598.953.642,00
	7	UNSUR KEWILAYAHAN	
	7.01	KECAMATAN	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		KECAMATAN MENGKENDEK	4.610.593.998,00
	7	UNSUR KEWILAYAHAN	
	7.01	KECAMATAN	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
	7	NON URUSAN	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN	
	7.01	KECAMATAN	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
4.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
		KECAMATAN GANDANGBATU SILLANAN	3.743.912.164,00
	7	UNSUR KEWILAYAHAN	
	7.01	KECAMATAN	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
4.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
		KECAMATAN SALUPUTTI	1.668.482.360,00
	7	UNSUR KEWILAYAHAN	
	7.01	KECAMATAN	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
		KECAMATAN REMBON	2.560.926.051,00
	7	UNSUR KEWILAYAHAN	
	7.01	KECAMATAN	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		KECAMATAN MALIMBONG BALEPE	1.609.337.443,00
	7	UNSUR KEWILAYAHAN	
	7.01	KECAMATAN	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
		KECAMATAN RANTETAYO	3.046.318.696,00
	7	UNSUR KEWILAYAHAN	
	7.01	KECAMATAN	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	7	NON URUSAN	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN	
	7.01	KECAMATAN	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
4.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
		KECAMATAN KURRA	1.986.252.988,00
	7	UNSUR KEWILAYAHAN	
	7.01	KECAMATAN	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
		KECAMATAN BONGGAKARADENG	1.553.872.927,00
	7	UNSUR KEWILAYAHAN	
	7.01	KECAMATAN	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
		Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
		KECAMATAN RANO	967.784.368,00
	7	UNSUR KEWILAYAHAN	
	7.01	KECAMATAN	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
		KECAMATAN BITTUANG	1.701.604.468,00
	7	UNSUR KEWILAYAHAN	
	7.01	KECAMATAN	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
		Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
		KECAMATAN MASANDA	813.078.907,00
	7	UNSUR KEWILAYAHAN	
	7.01	KECAMATAN	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
		KECAMATAN SIMBUANG	1.364.554.678,00
	7	UNSUR KEWILAYAHAN	
	7.01	KECAMATAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
	7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
	7.01.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
	7.01.01.2.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
	7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
		KECAMATAN MAPPAK	1.656.943.113,00
	7	UNSUR KEWILAYAHAN	
	7.01	KECAMATAN	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
4.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7.201.884.400,00
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
1.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
	8.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
	8.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	8.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
2.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	8.01.02.2.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	
	8.01.02.2.01.0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	
	8.01.02.2.01.0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	
	8.01.02.2.01.0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	
3.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
4.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
5.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
6.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
	8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	
	J U M L A H		1.272.807.073.524,21

Makale, 29 Agustus 2025

BUPATI TANA TORAJA,



ZADRAK TOMBEG